

# **Respon India Terhadap Belt Road Initiatives oleh Presiden Xi Jinping Melalui Asia Africa Growth Corridor**

**Callula Salsabillah<sup>1</sup> & Maria Indira Aryani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*

Email: maria\_indira.hi@upnjatim.ac.id

## **Abstract**

*The Belt and Road Initiative, which was initiated by China in 2013, is a multilateral foreign policy strategy that is not only in the form of cooperation in an economic scheme, but BRI also provides loans in the form of infrastructure investment to countries that join this project. India, as a country that considers BRI a threat to its country, has made an act to drive an economic scheme called the Asia Africa Growth Corridor with Japan and other countries in Africa. This action was carried out by India by cooperating with countries that have similar views on BRI and countries that have both suffered losses from the establishment of BRI by President Xi Jinping. This phenomenon is a form of balancing, in the theory of Balance of Power by Kenneth Waltz. This article aims to determine the balancing perspective in seeing the formation of AAGC by India as a counter form to China's BRI project.*

*Keywords: India, Balancing, Balance of Power, Asia Africa Growth Corridor, Belt and Road Initiatives.*

## **Abstrak**

*Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh Tiongkok pada 2013 lalu adalah strategi politik luar negeri yang bersifat multilateral yang tidak hanya berupa kerjasama dalam skema ekonomi, tetapi BRI juga menyediakan pinjaman dalam bentuk investasi infrastruktur pada negara yang bergabung dalam proyek ini. India sebagai salah satu negara yang menganggap BRI adalah suatu ancaman bagi negaranya, membuat India bertindak untuk menggerakkan sebuah skema ekonomi bernama Asia Africa Growth Corridor bersama Jepang dan negara-negara di Afrika. Tindakan ini dilakukan India dengan menggandeng negara yang memiliki pandangan serupa terhadap BRI dan negara yang sama-sama ditimpa kerugian atas dibentuknya BRI oleh presiden Xi Jinping. Fenomena ini merupakan suatu bentuk Balancing, dalam teori Balance of Power oleh Kenneth Waltz. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif balancing dalam memandang dibentuknya AAGC oleh India sebagai bentuk counter terhadap proyek BRI milik Tiongkok.*

*Kata Kunci: India, Balancing, Balance of Power, Asia Africa Growth Corridor, Belt and Road Initiatives.*

## **Pendahuluan**

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu strategi pembangunan global terbesar yang pernah dilakukan di abad ini. Program yang mengkoneksikan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui rute darat maupun laut (He, 2019). Strategi pembangunan global ini dirintis oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan pelopor strategi pembangunan ini merupakan Presiden mereka sendiri yaitu Xi Jinping yang dimulai di tahun 2013. Pemerintah Tiongkok memiliki misi bahwa BRI dapat dikatakan sebagai “suatu upaya untuk meningkatkan konektivitas regional dan menciptakan masa depan yang lebih cerah”. Beberapa ahli melihat bahwa misi dari BRI ini sebenarnya sebagai dorongan dominasi Tiongkok pada ranah global dan agar perdagangan dunia dapat dipusatkan di Tiongkok. Sebelum dinamai Belt and Road Initiative, strategi ini sempat dikenal dengan nama One Belt One Road (OBOR), kemudian pada September 2015, pemerintah Tiongkok merubah nama dari strategi tersebut menjadi Belt and Road Initiative (John Hurley, 2019). Tujuan dari strategi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi global. Inspirasi BRI sendiri berasal dari pelopor strategi tersebut yaitu Xi Jinping,

yang terilhami oleh strategi konsep Jalur Sutra (*Silk Road*) yang dibuat jauh pada zaman kekaisaran Dinasti Han 2000 tahun yang lalu. Jalur Sutra merupakan rute kuno perdagangan dari seluruh dunia yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Timur dan melewati wilayah India dan Persia dengan panjang kurang lebih 6500 km (Rolland, 2017).

Gambar 1. Peta Proyek Belt and Road Initiatives



Sumber: MERICS, 'The Silk Road Initiative', in MERICS China Mapping, ed. MERICS Research (Berlin: Mercator Institute for China Studies, 2017)

Dalam proyek Belt Road Initiatives, sektor perekonomian kawasan Asia dihubungkan melalui 2 konsep Silk Road yaitu Silk Road Economic Belt dan Maritime Silk Road. Kedua jalur ini menghubungkan ke berbagai rute perdagangan Tiongkok dengan negara-negara lainnya di Eropa, Asia dan beberapa negara lainnya di kawasan Pasifik dan Afrika seperti yang terdapat pada gambar di atas. Terdapat 3 koridor darat dan 2 koridor maritim yang mencakup atau melewati wilayah 71 negara yang terlibat dalam BRI (Bank, 2018). Dibangunnya proyek BRI ini kemudian memperluas infrastruktur Tiongkok di Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah serta menciptakan jangkauan pasar baru yang lebih luas bagi produk Tiongkok. BRI adalah tahap selanjutnya dalam upaya Tiongkok untuk "Go Global" atau memperluas pengaruh komersial dan politiknya (Githaiga, 2019). *Maritime Silk Road* melengkapi teori Balance of Power yaitu *China's String of Pearls* yang menegaskan bahwa Tiongkok berusaha membangun pangkalan di *Indian Ocean Region* (IOR) untuk memperluas kekuatan mereka dan mengamankan Selat Malaka dari potensi blokade selama perang (Brewster, 2016).

Pemerintah Tiongkok juga mengharapkan agar proyek BRI dapat mendorong restrukturisasi industri seiring dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mencoba persaingan di panggung global, mengadaptasi teknologi terbaik bagi prasarana nya, dan membangun pasar internasional berskala besar (He, 2019). Proyek ini telah memengaruhi India, sebagai salah satu negara *emerging power* selain Tiongkok di Indo-Pasifik, dalam memandang kebijakan luar negeri mereka., proyek BRI telah mempengaruhi segalanya mulai dari hubungan bilateral dengan Tiongkok dengan India serta hubungan Tiongkok dengan *superpower* lainnya seperti Amerika Serikat dan Australia.

Belt and Road Initiative merupakan gagasan yang menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional India karena inisiatif ini secara tidak langsung menggambarkan *strategic*

*encirclement* terhadap India. Selain dikarenakan adanya sengketa di wilayah perbatasan antar keduanya, Tiongkok telah membangun hubungan dekat dengan negara-negara tetangga India, termasuk beraliansi dan mendukung program proliferasi nuklir Pakistan. Hal ini semakin ditegaskan lewat kebijakan *Hexiao Gongda* milik Tiongkok yang menggandeng negara-negara kecil di wilayah Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma, dan Sri Lanka untuk menyaingi India sebagai regional power di kawasan Asia Selatan, sehingga secara tidak langsung pengaruh India pun akan semakin dibatasi (Malik, 2012)

Sebagai negara yang dijuluki *emerging powers* baik India dan Tiongkok tengah bersaing untuk memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah. BRI dianggap sebagai bentuk *encirclement* terhadap India karena inisiatif ini menekankan pada jalur darat dan laut yakni Economic Silk Road dan Maritime Silk Road yang dianggap India membatasi perkembangan dan keamanan nasional India (Cai, 2017). Selain itu, BRI juga berpotensi memberi ancaman terhadap keamanan nasional India, mengingat kedua negara India dan Pakistan memiliki sengketa di wilayah perbatasan (sengketa wilayah Kashmir) dan Tiongkok yang tengah gencar melakukan kerjasama dengan Pakistan termasuk membuka salah satu koridor dalam BRI yang langsung terkoneksi dengan Pakistan bernama CPEC. Hal ini diperparah dengan peningkatan hubungan bilateral antara Tiongkok dan Pakistan. Menanggapi pergerakan dan pengaruh Tiongkok yang begitu cepat, India pun mulai meningkatkan kekuatannya dengan fokus untuk mempertahankan diri dan mengamankan kepentingan nasionalnya, hal-hal tersebut merupakan faktor penyebab India memerlukan upaya untuk mengimbangkan posisinya dengan Tiongkok (Bagchi, 2016).

Beberapa upaya yang ditujukan India sebagai bentuk balancing terhadap BRI salah satunya adalah proyek koridor ekonomi bernama Asia Africa Growth Corridor (AAGC) yang merupakan proyek gabungan India dan Jepang, kedua negara yang sama-sama tidak mendukung adanya BRI. Kerjasama ini dideklarasikan oleh PM Narendra Modi dan PM Shinzo Abe di bulan November 2016. AAGC adalah inisiatif diplomatik untuk mempromosikan hubungan ekonomi, strategis dan budaya dengan kawasan Asia dan Afrika secara luas di berbagai tingkat, dengan tujuan untuk memberi dorongan baru dalam mengintensifkan hubungan ekonomi, strategis dan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang kini terus bertumbuh dan implikasinya terhadap tatanan regional berkembang (Kesavan, 2021). Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai AAGC yang dibentuk India untuk BRI dilihat melalui kerangka *balancing* dalam Balance of Power.

### **Balancing Dalam Balance Of Power (BoP)**

Dalam penelitian ini, peneliti hendak menggunakan perspektif *Balancing* dalam *Balance of Power* (BoP) dalam menganalisis permasalahan respon India beserta upaya yang dilakukannya dalam memberi counter pada BRI yang semakin mendominasi perdagangan di Asia. Dalam teori BoP, ketika terdapat satu negara yang lebih kuat dari yang lain, teori berasumsi bahwa negara tersebut akan memanfaatkan *power* yang dimilikinya untuk mendominasi negara-negara lain yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan negara-negara yang terancam untuk bersatu dalam sebuah koalisi pertahanan yang dalam kasus ini berupa AAGC. Menurut teori BoP, keamanan negara dapat dijamin dengan internal dan eksternal *balancing* (Schweller, 2010).

Secara internal, negara mempersenjatai diri guna melindungi negaranya, Waltz berpendapat bahwa negara akan memberlakukan *self-help* yang mengarah pada prediksinya tentang rendahnya tingkat kerja sama ekonomi antar negara lemah dan kuat. Dengan kata lain, jika saling ketergantungan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan, negara dapat memilih untuk mengorbankan manfaat ekonomi yang telah diperoleh untuk menjamin keamanan. Teori *balance of power* memprediksi bahwa proses dalam sistem multi-negara tertentu, keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal pada umumnya akan mencegah hegemoni. Sebaliknya, proposisi teoretis yang dibahas di sini menghasilkan tiga ekspektasi yang berlawanan tentang perilaku kekuatan-besar:

- (1) upaya untuk membentuk aliansi penyeimbang yang efektif akan sering gagal karena masalah tindakan kolektif;
- (2) hambatan politik di dalam masing-masing negara akan sering menyebabkan kegagalan untuk meniru inovasi oleh hegemoni potensial;
- (3) ketidakpastian tentang kekuatan mana yang merupakan ancaman hegemoni terbesar akan sering menghalangi atau menghalangi upaya untuk melakukan balancing. Mengenai hasil sistemik, proposisi teoretis ini mengasumsikan bahwa sangat mustahil hegemoni sistemik berada di bawah dua kondisi yang secara historis umum:
  - (a) ketika hegemoni yang meningkat mengembangkan kemampuan untuk menggabungkan dan secara efektif mengelola wilayah yang ditaklukkan;
  - (b) ketika batas-batas sistem internasional tetap stabil, dan tidak ada kekuatan besar baru yang muncul dari luar sistem. Artinya, hegemoni mungkin terjadi setiap kali hegemon yang diduga dapat melakukan penaklukan dan sistem tidak dapat berkembang untuk membawa penyeimbang potensial baru.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam meneliti artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena artikel ini ingin melihat bagaimana India mengupayakan sebuah bentuk perimbangan dengan menggunakan AAGC yang dianalisis melalui sudut pandang Balancing dalam teori Balance of Power. Pemilihan metodologi kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang dalam hal ini adalah bagaimana India merespon terhadap BRI dan dibentuknya AAGC oleh India sebagai salah satu cara India dalam merespon megaproyek oleh Tiongkok tersebut. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah atau menjawab setiap pertanyaan masalah yang ada.

Sedangkan pendekatan kualitatif diasumsikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif yang melibatkan keterlibatan kehidupan para aktor. Seperti yang dikatakan Sukidin dan Basrowi (2002) bahwa "Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan atau tulisan dan tingkah laku orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan perasaan. apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan deskripsi mendalam tentang pidato, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam pengaturan konteks tertentu yang dipelajari dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik" (Sukidin, 2002).

Dalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam memilih sumber data menggunakan teknik pengumpulan data dengan jenis data sekunder. Data studi kasus ini dapat diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari peneliti dari subjek. Hasil penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan (Azwar, 1998). Data sekunder inilah yang membantu memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai topik AAGC sebagai bentuk balancing India terhadap Belt Road Initiatives.

Peneliti memilih menggunakan data sekunder karena dalam hal ini masalah data yang dibutuhkan sudah ada dan peneliti hanya mengumpulkan serta menganalisis data sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini peneliti menggunakan situs resmi pemerintah India dalam melakukan upaya balancing nya melalui AAGC, situs pemerintah Cina untuk mengumpulkan informasi terkait BRI, berbagai jurnal ilmiah, situs berita dan organisasi think tank, buku dan artiikel terkait sebagai data sekunder karena datanya dapat dipertanggungjawabkan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai penolakan India terhadap strategi pembangunan global Belt and Road Initiative, dapat disimpulkan bahwa India sebagai negara yang berdaulat tidak ingin bekerjasama dalam program ini dikarenakan India berspekulasi bahwa dibalik program ini terdapat agenda tersembunyi yang akan dilakukan oleh Tiongkok pada negara-negara yang teritorinya dilalui oleh koridor BRI (Rana, 2017). Dalam penelitian ini terdapat beberapa kepentingan strategis yang menyebabkan India menolak BRI dan terdapat wujud penolakan India terhadap BRI. Kepentingan strategis yang menyebabkan India menolak BRI ini dibagi menjadi tiga kepentingan yaitu, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Politik dan juga Kepentingan Integritas Wilayah. Dalam penolakannya terdapat beberapa wujud penolakan yang dibuat oleh India seperti hengkangnya India dalam program ini dan pengeluaran *white paper* oleh India dalam merespon BRI (Sacks, 2021).

Dimulai dari Kepentingan Ekonomi yang merupakan salah satu kepentingan mengapa India menolak BRI dikarenakan India berpikir bahwa skema tersebut akan memungkinkan Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di kawasan Samudera Hindia maupun Asia hingga merugikan India, karena Tiongkok sendiri dapat memberikan dukungan finansial untuk menarik negara-negara Asia Selatan lainnya yang tidak dapat ditandingi oleh India, yang mana negara-negara ini akan lebih mendukung Tiongkok dibandingkan dengan India. India juga dijadikan target bagi Tiongkok dikarenakan India memiliki populasi terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Tiongkok sendiri sampai sekarang masih menjadi mitra dagang terbesar India dan 90% produk harian India masih di buat oleh Tiongkok.

Dalam Kepentingan Politik dari adanya BRI membuat India sebagai negara yang dilaluinya menolak akan hal ini. Kepentingan Tiongkok yang ingin mendikte dan juga mengatur negara peminjam agar dapat mudah masuk dalam bidang politik dan ekonomi sebuah negara, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam dunia Internasional. *Debt Trap* merupakan salah satu cara Tiongkok untuk menjatuhkan negara-negara yang dilewatinya, dan alhasil setidaknya sebanyak 150 negara di seluruh dunia berutang kepada Tiongkok (Brautigam, 2019).

Kepentingan geostrategis juga mengartikan bahwa Geostrategi merupakan strategi bisnis dengan memakai semua keterampilan maupun sumber daya manusia ataupun alam untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. BRI ini merupakan Geostrategi Tiongkok dalam meningkatkan kekuatannya secara eksternal, namun Geostrategis India menolak adanya BRI dikarenakan material India akan tersaingi dari segi Militer, Ekonomi, dan Politik (Karbuz, 2018).

Faktor geostrategis ini akan mempengaruhi biaya internal militer Tiongkok yang saat ini menduduki peringkat kedua di dunia, sedangkan India masih mengejar kekayaan materialnya dengan membangun ekonominya di kawasan Asia maupun global (Tovy, 2015). Kepentingan Integritas Wilayah juga merupakan salah satu pertimbangan India dalam menolak BRI. Beberapa hal yang mendasari India menganggap bahwa jika India bergabung dengan strategi ini salah satu dari faktornya adalah Integritas Wilayah mereka akan terganggu, sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu perhatian India mengenai BRI ini antara lain seperti, Melanggar norma dan standar internasional, Merusak klaim kedaulatan India atas wilayah perbatasan yang disengketakan jika bergabung dengan inisiatif saat CPEC melewati *Pakistan occupied Kashmir* (POK) dan memberi Tiongkok pengaruh geopolitik dan ekonomi yang besar terhadap pengambilan keputusan di negara tetangga India (Correspondent, 2020).

Dari adanya tiga kepentingan tersebut membuat India menolak Kerjasamanya dengan Tiongkok, India sendiri mengeluarkan beberapa wujud dalam penolakannya. Pertama yaitu hengkangnya India dalam BRI, bisa kita lihat bahwa India sudah sebanyak tiga kali hengkang dari rapat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan Tiongkok sebagai pertemuan antar negara dalam rangka rapat Kerjasama BRI. Sebagaimana pun India tetap mendukung penuh segala Kerjasama internasional, India sendiri melihat bahwa Kerjasama antara negara ini tidak akan menghasilkan mutual benefit jika itu tidak mendasar pada norma yang telah diakui

oleh komunitas internasional seperti pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan mengarah pada keuntungan bersama.

Kurangnya informasi spesifik membuat India bertanya-tanya apakah mungkin keseluruhan proyek ini hanyalah permainan Tiongkok saja. Pengeluaran White Paper oleh pemerintah India merupakan salah satu tanda yang dilakukan oleh pemerintah India dalam merespon BRI tersebut (Chatterjee, 2017). Pemerintah dari India menegaskan pendiriannya belum berinisiatif untuk turut berkontribusi dalam Belt and Road Initiative sejak pertama kali BRI ini diluncurkan pada tahun 2013 yang dibuktikan dengan *white paper* yang dikeluarkan sendiri oleh India guna merespon BRI yang digagas oleh negeri tirai bambu tersebut. India melihat bahwa BRI telah melanggar prinsip dasar yaitu mengenai Integritas Kedaulatan dan Wilayah. India sendiri adalah negara yang berdaulat, ia memilih untuk tidak bergabung dengan BRI karena melanggar prinsip yang akan merugikan negaranya.

Wujud penolakan yang dilakukan oleh pemerintah India adalah memperlihatkan ketegasannya dengan mengeluarkan white paper. India sendiri masih melakukan Kerjasama dengan negara-negara lain (Nanwani, 2019). Salah satu bentuk upaya India untuk memaksimalkan hubungan dengan mitra-mitra strategis selain Tiongkok adalah dengan mengeluarkan Act East Policy, salah satunya dengan Korea Selatan (Prabhandhari & Aryani, 2021). Selain itu, seperti yang diketahui bahwa India sendiri masih ingin mempertahankan kekuatan ekonominya dengan cara dibentuknya AAGC bersama dengan Jepang sebagai negara yang sama-sama memiliki posisi kontradiktif terhadap BRI. AAGC menawarkan alternatif yang baik untuk BRI yang memiliki potensi signifikan untuk konektivitas regional di tingkat negara bagian.

Dengan proyek infrastruktur yang menyediakan lapangan kerja lokal, investasi India dan Jepang di ekonomi asing dapat memperoleh dukungan regional yang lebih besar untuk visi mereka. Pengalaman Jepang sendiri dengan mendirikan rumah sakit menunjukkan bagaimana bentuk kerja sama ini dapat memastikan kehadiran Jepang yang lebih permanen tanpa memupuk persepsi lokal tentang kontrol asing (Control, 2019). Sesuai dengan modal dan keterampilan tinggi Jepang, ukuran dan pengalaman India sendiri dalam pembangunan ekonomi telah menantang untuk mengejar teknologi utama - baik dalam farmakologi atau energi matahari - dalam skala massal.

Dengan hubungan dekat di ASEAN dan pengaruhnya yang cukup besar di kawasan Asia, India secara luas dipandang sebagai kekuatan yang penuh kebajikan dan melalui ikatan budaya dan religiusnya dengan populasi diaspora, India memiliki keuntungan kuat dalam mempromosikan perdagangan. Komitmen yang kuat dari Jepang dan India mengenai infrastruktur dan pertukaran teknologi dapat menjembatani kesenjangan ekonomi dan geostrategis yang lebar di seluruh kawasan (Sachdeva, 2018).

## Kesimpulan

Dari analisis di atas dapat dilihat motivasi respon India terhadap BRI. India melihat bahwa Tiongkok memiliki agenda tersembunyi dalam BRI yang merupakan strategi besar untuk memperbesar pengaruh Tiongkok di negara-negara Asia, Afrika maupun Eropa. Dalam BRI, Tiongkok meminjamkan uangnya dengan menaruh modal di negara-negara yang dilewatinya dengan melakukan pembangunan besar-besaran di negara-negara tersebut. Jika negara tersebut pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan hutang yang sudah diberikan oleh Tiongkok, maka sebagai gantinya aset-aset negara yang dimiliki oleh negara tersebut akan ditarik secara paksa oleh Tiongkok sebagai hak milik dari Tiongkok selaku penanam modal. Hal ini dilihat oleh India sebagai mekanisme *Debt Trap* yang memiliki kerugian yang sangat besar bagi negara-negara yang bekerjasama dengan Tiongkok dalam BRI. Melihat kenyataan ini, India berusaha mengimbangi kekuatan Tiongkok dengan menggunakan AAGC. AAGC merupakan respon *balancing* India untuk menghadapi BRI Tiongkok. India melakukan respon *balancing* dengan menggunakan AAGC sebagai instrumen dengan

mempertimbangkan situasi internal dan eksternal India, utamanya dalam kaitan dengan kemitraan India dan negara-negara di kawasan Asia yang menjadi sasaran BRI.

### Daftar Pustaka

- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bagchi, I. (2016, February 8). *Dhaka Cancels Port to be Built by China, India Eyes Another*. Retrieved from The Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/dhaka-cancels-port-to-be-built-by-china-india-eyes-another/articleshow/50894554.cms>
- Bank, W. (2018, March 29). *Belt and Road Initiative*. Diambil kembali dari The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>
- Brautigam, D. (2019, December). *A critical look at Chinese 'debt-trap diplomacy': the rise of a meme*. Retrieved from ResearchGate: [https://www.researchgate.net/publication/337816614\\_A\\_critical\\_look\\_at\\_Chinese\\_%27debt-trap\\_diplomacy%27\\_the\\_rise\\_of\\_a\\_meme](https://www.researchgate.net/publication/337816614_A_critical_look_at_Chinese_%27debt-trap_diplomacy%27_the_rise_of_a_meme)
- Brewster, D. (2016). India and China At Sea. Dalam *A Contest Of Status And Legitimacy in Indian Ocean* (hal. 4-10). Asia Policy.
- Cai, P. (2017, March 22). *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Retrieved from Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative>
- Chatterjee, B. (2017). *Promises and Pitfalls of The Belt and Road Initiative*. Washington DC: East-West Center.
- Control, M. (2019, Oktober 30). *Here's why India has stayed away from China's Belt and Road Initiative*. Diambil kembali dari Money Control News: <https://www.moneycontrol.com/news/world/heres-why-india-has-stayed-away-from-chinas-belt-and-road-initiative-4586791.html>
- Correspondent, H. T. (2020, March 30). *India refuses to support China's Belt and Road project at SCO meet*. Diambil kembali dari Hindustan Times: <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-doesn-t-join-sco-members-in-endorsing-china-s-belt-and-road-project/story-CBH22ODWVImRFpwkkhehWI.html>
- Githaiga, N. M. (2019). The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity. Dalam Wang. *China Quarterly of International Strategic Studies*.
- He, B. (2019). *The domestic politics of the Belt and Road Initiative and its implications*. Journal Of Contemporary China.
- John Hurley, S. M. (2019). Examining the debt implications of the Belt and Road Initiative from a policy perspective. Dalam *Policy Perspective* (hal. 139-175). Journal Of Infrastructure.
- Karbus, S. (2018). *Geostrategic importance of East Mediterranean gas resources*. Springer: Springer Publisher.
- Kesavan, K. V. (2021, March 5). *India's 'Act East' policy and regional cooperation*. Retrieved from ORFOnline: <https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-act-east-policy-and-regional-cooperation-61375/>
- Malik, M. (2012). China and India Today: Diplomats Jostle, Militaries Prepare. *World Affairs*, 175(2), 74-84.

- Nanwani, S. (2019). *Belt and Road Initiative: Responses from Japan and India—Bilateralism, Multilateralism and Collaborations*. Global Policy.
- Prabhandhari, N. D., & Aryani, M. I. (2021). Act East Policy: Analisis Faktor Internal dan Eksternal India dalam Mengeluarkan Act East Policy terhadap Korea Selatan (2014-2019). *Frequency of International Relations*, 142-164.
- Rana, K. S. (2017). *China's belt and road initiative (bri): implications, prospects & consequences: impact on india & its china diplomacy*. ICS Occasional Paper.
- Rolland, N. (2017). *China's "Belt and Road Initiative": Underwhelming or game-changer?* Washington: The Washington Quarterly.
- Sachdeva, G. (2018). Indian perceptions of the Chinese Belt and Road initiative. Dalam *The Context* (hal. 285-296). Sage Journals.
- Sacks, D. (2021, Maret 24). *Countries in China's Belt and Road Initiative: Who's In And Who's Out*. Diambil kembali dari Council Foreign Relations: <https://www.cfr.org/blog/countries-chinas-belt-and-road-initiative-whos-and-whos-out>
- Schweller, R. L. (2010). *Unanswered threats: Political constraints on the balance of power*. Princeton: Princeton University Press.
- Sheehan, M. J. (1996). *The Balance of Power: History and Theory*. Psychology Press.
- Sukidin, B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Tovy, T. (2015). *The Changing Nature Of Geostrategy 1900-2000*. Diambil kembali dari Airuniversity: [https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B\\_0140\\_TOVY\\_CHANGING\\_NATURE\\_GEOSTRATEGY.pdf](https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B_0140_TOVY_CHANGING_NATURE_GEOSTRATEGY.pdf)
- Waltz, K. N. (1967). *International structure, national force, and the balance of world power*. Journal Of International Affairs.